

BAB I

PENDAHULUAN

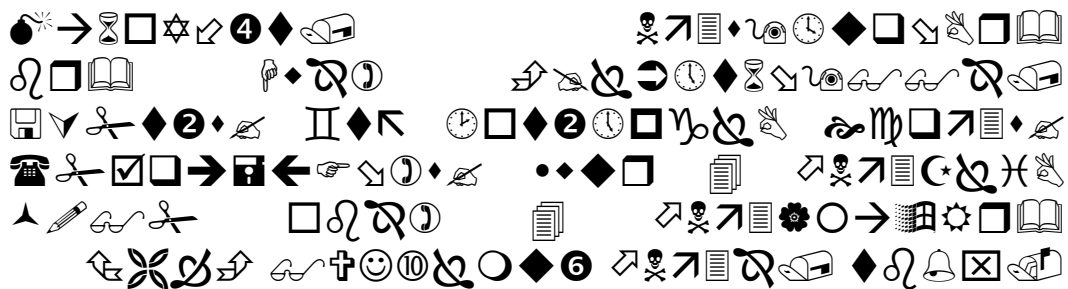
A. Latar Belakang Masalah

Terpuruknya perekonomian Indonesia yang terjadi mulai tahun 1997 mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan swasta baik di sektor industri, perdagangan maupun keuangan tidak mampu lagi bertahan. Dampak dari krisis perekonomian ini mengakibatkan perusahaan melakukan rasionalisasi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengurangi beban biaya tetap atau bahkan menutup usahanya karena sudah tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi ini. Akibat adanya rasionalisasi maupun pemutusan hubungan kerja dari perusahaan-perusahaan yang pailit ataupun yang tidak lagi mampu bertahan tersebut menambah angka pengangguran tenaga produktif.

Oleh karena desakan ekonomi keluarga, sementara peluang untuk bersaing mendapatkan pekerjaan di sektor formal sangat susah, maka banyak para penganggur dari akibat PHK ini bekerja di sektor informal. Salah satu pekerjaan yang sekarang banyak dilakukan oleh para penganggur ini adalah berdagang.¹ Berdagang sendiri merupakan salah satu pekerjaan yang disenangi Rasulullah saw, hal ini telah dijelaskannya dalam Al-Qur'an, yaitu:



¹<http://eprints.undip.ac.id/6271/1/Rb.Herliyanto.pdf>, diakses tanggal 10 Agustus 2013, pukul 14.00.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa’: 29).

Seorang pedagang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Namun terkadang kebanyakan pedagang tidak mempunyai cukup modal sehingga mereka berpikir untuk meminjam uang di mana saja seperti rentenir dengan bunga yang lebih tinggi daripada bank tanpa memikirkan sebab akibatnya yang terkadang malah membuat usaha yang mereka rintis malah mengalami kerugian.

Modal sangat diperlukan dalam mendirikan sebuah usaha. Besar kecilnya modal yang dibutuhkan tergantung dari besar kecilnya usaha yang akan didirikan. Banyak orang bilang bahwa modal tidak hanya uang. Modal bisa berupa keahlian, kemauan dan niat yang kuat.²

Modal adalah salah satu faktor produksi penting di antara berbagai faktor produksi yang diperlukan. Bahkan modal merupakan faktor produksi paling penting untuk pengadaan faktor produksi lainnya seperti membeli tanah, bahan baku, tenaga kerja dan teknologi lain.

²http://carapedia.com/pengertian_definisi_modal_info2090.html., diakses tanggal 10 Agustus 2013, pukul 14.00.

Menurut Meiji sebagaimana dikutip oleh Bambang Riyanto, modal adalah “kolektivitas dari barang-barang modal” yang terdapat dalam neraca sebelah debit³. Sedangkan Gutmann dan Dougall membagi pengertian modal dari berbagai sudut pandang sebagai berikut :

1. *Legal view capital*. Modal diartikan sebagai modal saham atau suatu perusahaan, yang dibentuk dalam suatu perseroan terbatas.
2. *Accounting of view capital*. Modal diartikan sebagai selisih antara harta dengan utang, inilah yang disebut modal sendiri.
3. *Business of view capital*. Memandang modal dengan bertitik tolak dari sisi kiri neraca, dengan menganggap modal perusahaan sebagai totalitas dari barang-barang modal yang dimiliki oleh perusahaan.
4. *Economic of view capital*. Dalam sudut pandang ini modal dititikberatkan pada unsure kekayaan (*wealth*)⁴.

Dari beberapa definisi modal tersebut, maka secara umum dapat dikatakan bahwa antara ahli ekonomi dan pengusaha dapat berbeda dalam memberi arti pada modal. Menurut ahli ekonomi modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya, sedangkan pengusaha berpendapat bahwa modal adalah nilai buku dari surat berharga. Namun berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pengertian modal sebenarnya tidak ada perbedaan yang fundamental tetapi tergantung dari sudut mana memandangnya.

³Bambang Riyanto, *Kredit Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 18.

⁴Buchari Alma, *Prosedur Kredit Perbankan*, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2000), h. 229.

Modal usaha bagi perseorangan atau kelompok usaha kecil merupakan permasalahan yang cukup pelik. Tidak hanya menghambat kelangsungan bisnis tetapi bisa mejadi penyebab gagalnya usaha yang tengah dirintis. Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki komitmen untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan dibukanya Kredit untuk Modal usaha bagi UMK dan koperasi yang disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR ini merupakan alternatif bagi Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi untuk mendapatkan modal usaha. Kendala yang seringkali dihadapi oleh pengusaha Kecil, Mikro dan Koperasi adalah masalah permodalan di dalam mengembangkan usahanya.

Karena itulah Bank BRI melalui Kredit Usaha Rakyat ini bermaksud memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha mikro,kecil, menengah dan koperasi, yang sudah *feasible* tetapi belum *bankable* mendapatkan modal usaha. Pinjaman modal usaha ini merupakan alternatif yang cocok bagi UMKM.

Biasanya pihak bank agak sulit untuk memberikan kredit modal usaha bagi kelompok ini, dengan pertimbangan-pertimbangan usaha yang belum *bankable* dan UMK dianggap memiliki risiko yang cukup tinggi bagi bank. Dengan pemberian kredit modal usaha ini diharapkan akan meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan koperasi kepada lembaga keuangan. Implikasi lebih jauh kucuran kredit ini akan dapat mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan

koperasi. Pada kenyataannya berkembangnya Usaha Kecil, Mikro dan koperasi mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar, harapan lebih jauh dengan modal usaha melalui KUR angka pengangguran dan angka kemiskinan dapat dikurangi. Mempermudah penyaluran modal usaha bagi rakyat diharapkan mampu mendorong tumbuhnya ekonomi secara signifikan.

Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp 500 juta. Sumber dana adalah bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum 16 persen per tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70 persen dari alokasi total kredit yang disediakan oleh bank tersebut. Masa pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. Untuk agribisnis, bidang usaha yang layak adalah input produksi hingga penyediaan alat dan mesin pertanian, aktivitas *on-farm*, dan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian.⁵

Ada tiga skim yang dapat dilayani oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini yaitu: *Pertama*, KUR Ritel, Modal usaha dengan plafond Rp. 5 Juta s/d Rp. 500 juta dapat dilayani Kantor cabang BRI dan Kantor Cabang Pembantu. *Kedua*, KUR Mikro, Modal Usaha dengan plafond di bawah Rp. 5 juta, dapat dilayani oleh BRI Unit. *Ketiga*, KUR Linkage, ditujukan untuk BKD, KSP/USP, BMT, LKM lainnya dapat dilayani di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.

⁵ Bambang Riyanto, *Kredit Perbankan*, op. cit., h. 20.

Plafond kredit Rp. 5 Juta s/d Rp. 500 juta. Pinjaman LKM ke *end user* maksimal Rp. 5 juta.⁶

Ketentuan-ketentuan pengajuan kredit modal usaha untuk ketiga macam skim KUR ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Ketentuan Umum KUR

Keterangan	Persyaratan
Calon Debitur	Individu (Perorangan/badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Besar Kredit	Maksimal Rp. 500 juta
Bentuk Kredit	KMK Menurun – maksimal 3 tahun KI – maksimal 5 tahun
Suku Bunga	Efektif maksimal 16 % pa
Perijinan	S/d Rp. 100 juta : SIUP, TDP & SITU arau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/ Kepala Desa > Rp. 100 juta : Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku
Legalitas	Individu : KTP & KK Kelompok : Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari kepala Desa / Kelurahan atau Akte Notaris Koperasi / Bdan Usaha Lain : Sesuai ketentuan yang berlaku
Agunan	Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak Tambahan : Al Seperti tanah/bangunan/Kendaraan (tidak wajib dipenuhi)

Tabel 1.2. Ketentuan Umum KUR MIKRO

⁶*Ibid.*, h. 21.

Keterangan	Persyaratan
Calon Debitur	Individu yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Besar Kredit	Maksimal Rp. 5 juta
Jenis Kredit	KMK atau KI Menurun maksimal 3 tahun
Suku Bunga	Efektif maksimal 1,125 % flate rate per bulan
Prov & adm	Tidak dipungut
Legalitas	KTP & KK
Agunan	Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) Tambahan : Al Seperti tanah/bangunan/Kendaraan (tidak wajib dipenuhi). ⁷

Tabel 1.3. Ketentuan KUR Linkage Program

Keterangan	Persyaratan
Calon Debitur	BKD, KSP/USP, BMT & LKM Lainnya & tidak mempunyai tunggakan
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Besar Kredit	Maksimal Rp. 500 juta Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maks Rp. 5 juta
Jenis Kredit	KMK Menurun maksimal 3 tahun
Suku Bunga	Efektif maksimal 16 % pa.
Prov & adm	Tidak dipungut
Legalitas	AD/ART Memiliki Ijin usaha dari yang berwenang Pengurus aktif
Agunan	Pokok : Piutang kepada nasabah Tambahan : Al Seperti tanah/bangunan/kendaraan (tidak wajib dipenuhi)

Dalam peninjauan pendahuluan, mekanisme KUR pada BRI Cabang Banjarmasin bersama dengan unit-unitnya agak sulit, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk diketahui hasilnya. Bahkan kadang-kadang ditolak padahal

⁷<http://galeriukm.web.id/permodalan/modal-usaha-dari-kredit-usaha-rakyat-kur-bri.>, diakses tanggal 15 Agustus 2012, pukul 20.00.

nasabah optimis permohonan dikabulkan. Pihak nasabah sendiri merasa kesulitan mengembangkan usaha baik karena kesulitan modal maupun pemasarannya. Pihak bank maupun nasabah kadangkala juga dihadapkan pada masalah agunan dan prospek usaha nasabah yang kurang meyakinkan.

Dari permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam tentang masalah tersebut dan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Implementasi Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin?
2. Bagaimana implementasi Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin
2. Untuk mengetahui Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Memberi kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kualitas pelayanan jasa yang diberikan oleh BRI Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fixed*.

2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.⁸ Maksud kredit dalam pembahasaan ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin.

Jadi, yang dimaksud judul ini adalah meneliti mekanisme, pelaksanaan atau realisasi serta kendala di lapangan dalam hal program KUR pada Bank BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan BRI di antaranya:

Skripsi Almawati, meneliti tentang “Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dalam Pembiayaan Mudharabah”. Penelitian ini menunjukkan bahwa bank bersangkutan sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah, hasil ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana penjelasan Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah sebagai pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

⁸Suharno, *Analisis Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h.1.

⁹Almawati, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada BRI Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dalam Pembiayaan Mudharabah*”, Skripsi (Banjarmasin, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 2009).

Skripsi Nanik Wiyanti, meneliti tentang “Penerapan Pembiayaan Al-Mudharabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Banjarmasin”. Masalah yang diteliti lebih menitikberatkan pada prosedur-prosedur yang diterapkan di lapangan dan kesulitan menarik kembali dana apabila terjadi *wan prestasi* (tidak menepati janji atau kewajiban).¹⁰

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, maka terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah selain dilakukan di tempat dan lokasi yang berbeda, penelitian ini membahas mekanisme KUR, implementasi serta kendala KUR pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin.

Penelitian ini juga dirasakan pentingnya mengingat banyak sekarang ini pelaku usaha mikro kecil yang kesulitan permodalan, yang kadangkala mereka itu terjerat dengan rentenir yang memberikan pinjaman secara mudah tetapi berbunga tinggi, sehingga merugikan bagi pelaku usaha tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

¹⁰ Nanik Wiyanti, “Penerapan Pembiayaan Al-Mudharabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Banjarmasin”, Skripsi (Banjarmasin, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 2009).

Bab II, Tinjauan tentang Kredit Usaha Rakyat, merupakan landasan teoritis yang berisi uraian tentang pengertian kredit, macam-macam kredit, Kredit Usaha Rakyat, sasaran Kredit Usaha Rakyat, prosedur Kredit Usaha Rakyat.

Bab III, Metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi gambaran umum (profil) BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin, mekanisme Kredit Usaha Rakyat, implementasi Kredit Usaha Rakyat dan kendala penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Kayu Tangi Banjarmasin. Selanjutnya analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian.

Bab V, Penutup yang memuat simpulan dan saran.